



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 526 BD/HK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA/PENGARAH, PENETAPAN PESERTA DAN PENYAJI MAKALAH DISKUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI PROPINSI LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk pemantapan pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Daerah Lampung, perlu menyelenggarakan Diskusi/Konsultasi Pemantapan Pembinaan UPT Wilayah Indonesia Bagian Barat - Tahun 1991;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Diskusi/Konsultasi tersebut dengan baik, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara/pengarah Diskusi/Konsultasi Pemantapan Pembinaan UPT Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 1991.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, tentang Keturunan Pokok Transmigrasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989, tentang Pembangunan Lima Tahun ke V;
7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
8. Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor SKB.62/MEN/1989 dan Nomor 284 Tahun 1989, tentang Pembinaan dan Penyerahan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07-III-Tahun 1991, tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Desa Tahun 1991/1992 di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan...

- Keenam : Biaya kegiatan penyelenggaraan Diskusi/Konsultasi Pemantapan Pembinaan UPT Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 1991 di Propinsi Lampung dibebankan - kepada Proyek Peningkatan Daya Guna Pembangunan - Desa Propinsi Lampung MA.07.1.01.142880.10.05.12
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila - dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.-

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 5 - 11 - 91

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

BOEDJONO PRANYOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri,
 2. Bapak Ketua Bappenas,
 3. Bapak Menteri Transmigrasi,
 4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa,
 5. Sdr.Direktur Jenderal PUOD
 6. Sdr.Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
 7. Sdr.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Wilayah Indonesia Bagian Barat,
 8. Sdr. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung dan Sarolangun Bangko Prop.Jambi.
 9. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung,
 10. Sdr.Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Propinsi Lampung
 11. Himpunan Keputusan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 526 /BD/HK/1991

TANGGAL : 5 - 11 - 91

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA/PENGARAH,
PENETAPAN PESERTA DAN PENYAJI MAKALAH DIS-
KUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN PEMBINAAN UNIT-
PEMUKIMAN TRANSMIGRASI WILAYAH INDONESIA -
BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI PROPINSI LAMPUNG.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA/PENGARAH DISKUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN
PEMBINAAN UPT WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI PROPINSI-
LAMPUNG.-

I. TIM PENGARAH (SC)

1. Pengarah : -Direktur Jenderal Pembangunan Desa
-Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
-Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
2. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
3. Wakil Ketua Umum : Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
4. Ketua Pelaksana/
Penanggung Jawab : Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.
5. Sekretaris : R. Kresno Hindartono, SH.
6. Wakil Sekretaris : Drs. Dolok Saribu.
7. A n g g o t a : - Ir. Haris Hasyim (Kabid Ekonomi Bappeda Tingkat I Lampung.
- Kakanwil Transmigrasi Propinsi Lampung.
- Kakanwil Kehutanan Propinsi Lampung.
- Karo Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Lampung.
- Zul Arsyi, SH.

II. TIM PENYELENGGARA(OC)

1. K e t u a : R.Kresno Hindartono, SH.
2. Sekretaris : Drs. Sarnauli Sinambela.
3. Seksi Naskah : Normali Rizal, AR. SE.
Zubier Harahap.
4. Seksi Protokol, Humas dan persidangan : Drs. Lukmansyah.
Budimawarto.
5. Seksi Akomodasi/Konsumsi dan Transport : Thontowi Achyar, BA.
Suindartini, BA.
Ria setiawati
Marzuki, AR.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 526 /BD/HK/1991

TANGGAL : 5 - 11 -91

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA/PENGARAH, PENETAPAN PESERTA DAN PENYAJI MAKALAH DISKUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN PEMBINAAN UPT WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI PROPINSI LAMPUNG.

PESERTA DISKUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI -
PROPINSI LAMPUNG.

I. PESERTA DARI PUSAT.

1. Drs. TA.Salim (Kepala Biro Bantuan Pembangunan Daerah BAPPENAS)
2. Drs. Sugeng Sumarto (Direktur Tata Pemukiman dan Prasarana)
3. Drs. Mochtar Sadely (Staf BAPPENAS)
4. Drs. Yunusal Yunus (Direktur Pemerintahan Desa)
5. Drs. Moh Toha, AS.(Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pemukiman)
6. Drs. Kusdiono (Kasubdit Persiapan Pemukiman Kembali)
7. IG. Suratidjo,BIE (Kepala Sub Direktorat Prasarana Desa)
8. Anwar Salim (Kepala Seksi Pemukiman Daerah Transmigrasi)
9. S a i d (Kepala Seksi Bimbingan Teknis Pelaksanaan).

II. PESERTA DARI DAERAH.

1. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi D.I. Aceh.
2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi R i a u.
5. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jambi.
6. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bengkulu.
7. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi DKI.Jakarta.
10. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Barat.
11. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi DI.Yogyakarta.
12. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Lampung.
13. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.
14. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Bengkulu.
15. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Jambi
16. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Barat
17. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan.
18. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi R i a u
19. Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi Prop.Kalimantan Barat.
20. Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.
21. Bappeda Tingkat I Lampung
22. Bappeda Tingkat I Propinsi Bengkulu.
23. Bappeda Tingkat I Propinsi Jambi
24. Bappeda...

24. Bappeda Tingkat I Propinsi R i a u.
25. Bappeda Tingkat I Propinsi Jawa Barat.
26. Bappeda Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan.
27. Bappeda Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat.
28. Tingkat II Kabupaten Lampung Utara.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 526/BD/HK/1991.

TANGGAL : 5 - 11 -91

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENETAPAN PESERTA DAN PENYAJI MAKALAH DISKUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN PEMBINAAN UPT WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI PROPINSI LAMPUNG.

PENYAJI DAN MAKALAH PADA ACARA DISKUSI/KONSULTASI PEMANTAPAN PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 1991 DI PROPINSI LAMPUNG.

1. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

"Program Transmigrasi serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan desa".

2. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SARKO PROPINSI JAMBI.

"Program transmigrasi serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan desa".

3. KETUA BAPPEDA TINGKAT I LAMPUNG.

"Pelaksanaan program transmigrasi serta pengaruhnya terhadap pengendalian pembangunan daerah dan desa".

4. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TRANSMIGRASI PROPINSI LAMPUNG.

"Pelaksanaan program transmigrasi di Daerah Lampung dalam rangka penataan kependudukan dan faktor hambatan serta penunjang kelancaran".

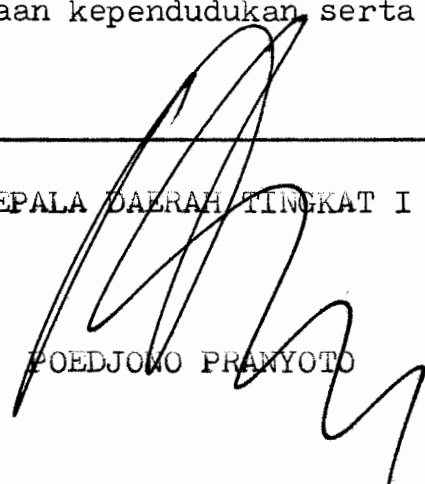
5. B A P P E N A S .

"Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi, kaitannya dengan Kebijakan Nasional di Bidang Pengembangan Tenaga Kerja".

6. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG.

"Permasalahan Perambah Hutan di Propinsi Lampung dan pemecahan masalahnya dalam rangka penataan kependudukan serta melestarikan sumber daya alam".

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO